

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Dewan Cium Kerugian Negara

Pembebasan Lahan di Ancol Dibanderol Rp1,5 Triliun

JAKARTA-Komis B DPRD DKI Jakarta menilai pembelian lahan untuk depo Moda Raya Terpadu (MRT) di kawasan Ancol Barat Jakarta Utara akan merugikan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengaku kesal dengan pengadaan lahan tersebut. Sebab dari riwayatnya tanah itu mulanya adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun karena tidak difungsikan, lahan itu lalu dijual ke pihak swasta dan kini dibeli lagi oleh BUMD lain yakni PT MRT Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung lahan tersebut dibanderol dengan harga Rp1,5 triliun dan disanggupi oleh PT MRT Jakarta. Lahan itu mempunyai luas sekitar 4,62 ribu meter persegi. "Ya itu terjadi, dari satu BUMD dijual ke pihak ketiga. Trus BUMD lain beli dari pihak tersebut, untuk apa? Berarti ini pemborosan anggaran negara," kata Aziz di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Aziz memang belum mengetahui secara pasti harga jual lahan tersebut saat dilepas PT Jakarta Propertindo. Makanya hari ini mereka berencana mengklarifikasi hal itu dalam rapat evaluasi dan rencana kerja BUMD namun rapat batal karena sejumlah pejabat Pemprov DKI mangkir.

"Nah itu yang kita klasifikasi sebenarnya," pungkasnya. Dalam rapat yang dijadwalkan ulang pada Rabu (22/7/2020), Aziz mengaku bakal mempertanyakan hal ini pada BUMD terkait. Mereka bakal meminta penjelasan termasuk harga jual yang disepakati Jakpro dengan pihak swasta saat itu dan alasan melepas lahan yang kemudian dibeli lagi oleh BUMD DKI.

"Kami ingin klarifikasi dulu, sebenarnya ini dijual berapa, dibeli berapa kalau harga sama ya berarti enggak ada kerugian negara Pemda di situ. Tapi prosesnya juga perlu kita dalam, kenapa bisa dijual ke situ terus dibeli lagi, alasannya apa," paparnya.

Abdul Aziz merasa ada yang ganjil dari pen-



Kami akan terus kolaborasi sehingga jelas apa yang terjadi. Jangan sampai ini dijadikan permainan oleh oknum tertentu."

Abdul Aziz
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta

gadaan lahan untuk pembangunan Depo MRT di Ancol Timur Jakarta Utara.

Dalam pembangunan proyek MRT fase I dan II di Ibu Kota, Pemprov DKI memang menggandeng Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA melakukan pembiayaan dan kajian lokasi pembangunan Depo MRT mulai dari konstruksi tanah hingga layak atau tidaknya suatu lokasi di bangun Depo MRT.

Yang aneh menurut Aziz pembangunan Depo MRT Ancol Barat merupakan lokasi yang kini dikuasai oleh perusahaan asal Jepang yakni PT Asahimas Flat Glass Tbk. Perusahaan ini menguasai sebagian besar lahan tersebut. Aziz khawatir ada persekongkolan yang bisa merugikan Pemda DKI.

"Kita tahu PT Asahimas ini bersama JICA itu sama-sama investornya Jepang. Jangan sampai ada kongkalikong dua Perusahaan Asing. Yang dirugikan pemda," kata Aziz.

Jangan Diperpanjang

Komis B DPRD DKI Jakarta meminta kepada eksekutif untuk tidak memperpanjang tujuh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikantongi PT Asahimas Flat Glass di Kawasan Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara.

Sebab lahan yang dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk itu akan dibangun sebagai depo kereta MRT Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pihaknya masih mendalami status kepemilikan HGB oleh pihak swasta tersebut.

Berdasarkan informasi yang dia dapat, paling cepat masa berlaku HGB lahan itu pada 2022 mendatang. "Dari tujuh sertifikat itu ada yang habis tahun 2029, 2022 dan sebagainya, makanya saat rapat tadi, kami menanyakan apakah semua (tujuh HGB) ini sudah diperpanjang apa belum," kata Aziz.

Empat BUMD itu di antaranya PT MRT Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Bank DKI. Dari rapat itu juga terungkap bahwa, PT Jakpro juga mengantongi tiga sertifikat HGB seluas 20.082 meter persegi. Sertifikat

itu dimiliki PT Jakpro sejak 2017 lalu.

"Kalau HGB itu sudah diperpanjang, malah menjadi haknya Asahimas lagi untuk menggunakannya," ujar Aziz. Karena itu, kata Aziz, bila Asahimas belum mengajukan perpanjangan HGB di sana, sebaiknya pemerintah daerah menghentikan kerja samanya.

Selain itu, lokasi lahan di sana cenderung indah ke wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi sekitar 2016 lalu.

"Karena sekarang kosong, kami mendorong agar tidak diperpanjang," ucapnya.

Meski demikian, dalam rapat itu, Komisi B belum mendapat kepastian soal masa status HGB tersebut dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) DKI Jakarta. Alasannya, dinas terkait akan mengecek kembali dokumen yang sudah dia terbitkan tersebut.

"Itu kan masih ngambang (belum jelas statusnya). Jadi harus ada kejelasan mengenai status HGB nya dulu, jangan sampai kita bangun ternyata kita harus bayar (kompensasi) ke Asahimas karena itu masih hak mereka," jelasnya.

Menurutnya, pembahasan mengenai status HGB dan HPL ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses administrasi dan keuangan. Jangan sampai, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan anggaran hanya untuk 'membayar' lahannya sendiri.

"Kalau sampai begitu (membayar) dalam hal ini Pemda DKI justru akan dirugikan karena sebenarnya milik Pemda DKI sendiri," ungkapnya. "Justru kalau bisa kita tarik (HGB), yah ditarik karena akan digunakan untuk depo," tambahnya.

Aziz menjelaskan, dari 10 HGB di sana tercatat ada satu lokasi yang memiliki lahan paling luas sekitar 93.970 meter persegi dengan masa berlaku sampai 2022 mendatang. Sementara lahan yang paling kecil seluas 2.246 meter persegi dengan masa berlaku sampai 2029.

"Kami akan terus kolaborasi sehingga jelas apa yang terjadi. Jangan sampai ini dijadikan permainan oleh oknum tertentu," ungkapnya. (dni)